

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Upaya peningkatan kesejahteraan sosial merupakan tujuan bangsa Indonesia yang tercantum dalam pembukaan UUD 1945. Menurut Suharto (2006) pembangunan kesejahteraan sosial adalah segenap strategi dan aktifitas yang dilakukan oleh pemerintah, dunia usaha, maupun masyarakat madani (*civil society*) untuk meningkatkan kualitas kehidupan manusia melalui kebijakan dan program yang bermatra pelayanan sosial, penyembuhan sosial, perlindungan sosial dan pemberdayaan masyarakat.

Tujuan utama dari peningkatan kesejahteraan sosial adalah penanggulangan kemiskinan. Meskipun peningkatan kesejahteraan sosial dibuat untuk kebutuhan publik yang sangat luas, namun target utama dalam upaya ini adalah masyarakat yang memerlukan, yaitu orang miskin, anak-anak dan wanita korban kekerasan, anak jalanan, pekerja anak, dan orang dengan kemampuan berbeda (*difabel*).

Secara garis besar perekonomian di Indonesia mengalami peningkatan seperti pendapat Ahmad Erani Yustika (2012), Indonesia adalah negara yang telah mengambil pilihan reformasi ekonomi dalam skala besar, diantaranya adalah ditandai dengan liberalisasi sektor keuangan dan perdagangan, desentralisasi ekonomi, menjalankan sistem ekonomi pasar (termasuk proyek-proyek BUMN), disiplin fiskal dan moneter. Reformasi ekonomi harus diakui dalam beberapa bagian menghasilkan kinerja ekonomi yang baik, khususnya stabilitas makro

ekonomi. Namun demikian, di luar stabilitas makro ekonomi, reformasi ekonomi hanya membuat berbagai isu yang mengkhawatirkan bagi masa depan perekonomian nasional, seperti kenaikan ketidakseimbangan pendapatan penduduk, kemiskinan, dan pengangguran.

Upaya peningkatan kesejahteraan dilakukan pemerintah dengan berbagai kebijakan. Adanya otonomi daerah memberikan kekuasaan pemerintah daerah untuk mengembangkan suatu daerah sesuai dengan potensi dan kekhasan daerah masing-masing. Keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah merupakan titik fokus yang penting dalam rangka memperbaiki kesejahteraan sosial. Pentingnya perbaikan kesejahteraan sosial dapat mendukung tujuan pemerintah dalam program pengentasan kemiskinan.

Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) tingkat kemiskinan di Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun 2014 sebesar 11,25 persen. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat persentase penduduk miskin di Daerah Istimewa Yogyakarta masih tinggi. Penurunan angka kemiskinan Daerah Istimewa Yogyakarta hanya turun 0,48 persen dibandingkan tahun sebelumnya, oleh karena itu Pemerintah Provinsi DIY melakukan evaluasi menyeluruh terhadap program pengentasan kemiskinan.

Strategi penanggulangan kemiskinan yang telah diterapkan pemerintah provinsi DIY adalah peningkatan produktivitas/kapasitas penduduk miskin melalui berbagai program pemberdayaan seperti, peningkatan daya beli masyarakat miskin melalui pengendalian inflasi, kenaikan subsidi dan bantuan sosial, peningkatan akses terhadap akses pelayanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, air bersih dan infrastruktur lainnya, pemberdayaan Usaha Mikro Kecil

dan Menengah (UMKM), pengendalian jumlah penduduk melalui program keluarga berencana (KB) dan program-program terkait lainnya.

Provinsi DIY memiliki luas 3185,80 km², yang terdiri dari 4 kabupaten yaitu kabupaten Sleman, kabupaten Bantul, kabupaten Gunung Kidul, kabupaten Kulon Progo dan 1 kota yaitu kota Yogyakarta. Pada wilayah kabupaten Sleman menurut data yang diperoleh dari Republika (2014), menyebutkan bahwa tingkat kemiskinan Kabupaten Sleman pada 2013 tercatat menurun dari 15,85 persen menjadi 13,89 persen. Namun, penurunan kemiskinan tersebut belum merata di tingkat kecamatan. Penurunan kemiskinan di Kecamatan Cangkringan tercatat paling tinggi dibandingkan kecamatan lain, penurunan kemiskinan yang tinggi ini dikarenakan pemulihan pascaerupsi Gunung Merapi cepat. Tingkat kemiskinan di kecamatan lain yang relatif tidak terkena dampak bencana hanya turun paling tinggi di level 5,61 persen. Tingkat kemiskinan tersebut dimiliki Kecamatan Sleman mencatat kemiskinan 24,92 persen. Sementara itu, penurunan tingkat kemiskinan yang paling rendah dicatat Kecamatan Depok yaitu turun 0,27 persen menjadi 4,08 persen pada 2013.

Penurunan kemiskinan yang belum tinggi dan tidak merata mendorong penulis untuk mengkaji lebih dalam daerah mana saja yang perlu mendapatkan perhatian, sehingga membantu pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta beserta pemerintah Kabupaten Sleman dalam mengatasi tingkat kemiskinan di daerah. Proses pengkajian dilakukan dengan mengklasifikasikan semua kecamatan di Kabupaten Sleman kedalam tiga kelompok sesuai kriteria Badan Pusat Statistik (BPS). Alasan lain perlunya dilakukan klasifikasi di tingkat kecamatan adalah

dikarenakan BPS masih terbatas klasifikasi di tingkat kabupaten, maka perlu dilakukan penelitian lanjut dengan klasifikasi di tingkat kecamatan. Hasil yang diperoleh dari pengklasifikasian dapat menggambarkan daerah mana yang memasuki wilayah dalam kategori tingkat kesejahteraan rendah, tingkat kesejahteraan sedang dan tingkat kesejahteraan tinggi. Pengelompokan wilayah menurut tingkat kesejahteraannya ini membantu pemerintah daerah untuk mendistribusikan program pengentasan kemiskinan di beberapa kecamatan dengan tepat sasaran.

Pada analisis statistika terdapat beberapa macam analisis yang bertujuan untuk mengelompokkan suatu objek ke dalam kelompok tertentu diantaranya analisis klaster dan analisis diskriminan. Analisis klaster adalah analisis statistika yang bertujuan untuk mengelompokkan data sedemikian sehingga data yang berada dalam kelompok yang sama mempunyai sifat yang relatif homogen daripada data yang berada dalam kelompok yang berbeda. Sedangkan menurut Friday dan Abdul (2012) analisis diskriminan adalah cara pembentukan kombinasi linear dari pengamatan atau variabel yang diukur dan menggambarkan pemisahan antar kelompok yang diketahui dari pengamatan tersebut dan mengevaluasi keakuratan klasifikasi.

Penelitian tentang kedua analisis tersebut telah dilakukan oleh Amnon Frenkel (2004), yang melakukan klasifikasi kota-kota dengan memperhatikan komposisi penggunaan lahan di daerah mereka. Analisis yang digunakan untuk proses klasifikasi ini didasarkan pada data penggunaan lahan yang dikumpulkan dari sampel luas kota-kota di Israel. Kombinasi dari dua

analisis multivariat dilakukan untuk proses klasifikasi tersebut. Pertama analisis kluster digunakan untuk menentukan kelompok kota dengan pola penggunaan lahan yang sama, dan kedua analisis diskriminan dilakukan untuk menguji kebenaran solusi kluster yang telah dilakukan dan mengetahui perbedaan yang signifikan secara statistik antar kelompok.

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Anita Nur Qomariah(2006), yang telah berhasil melakukan studi klasifikasi kabupaten dan kota di Jawa Timur berdasarkan variabel-variabel sosial ekonomi yaitu pendidikan, kesehatan dan tingkat kesejahteraan dengan pendekatan analisis diskriminan yang memperoleh dua kelompok. Kelompok pertama terdiri atas 24 Kabupaten yang selanjutnya dikategorikan sebagai daerah dengan tingkat sosial ekonomi rendah. Kelompok kedua terdiri dari 5 Kabupaten dan 9 Kota yang selanjutnya dikategorikan sebagai daerah dengan tingkat sosial ekonomi tinggi, dengan tingkat ketepatan klasifikasi sebesar 100%.

Diah Safitri (2012) juga melakukan analisis kluster pada kabupaten di Jawa Tengah berdasarkan produksi Palawija. Dari hasil analisis diperoleh kelompok 1 terdapat 8 kabupaten mempunyai potensi tinggi dalam produksi jagung, kelompok 2 terdapat 25 kabupaten mempunyai potensi tinggi produksi kacang tanah, dan kelompok 3 terdapat 2 kabupaten yang mempunyai potensi tinggi dalam produksi kedelai, produksi kacang hijau, produksi ubi kayu, dan produksi ubi jalar.

Berdasarkan hasil penelitian-penelitian tersebut terlihat bahwa dalam analisis diskriminan menghasilkan mengelompokkan yang lebih baik dikarenakan dalam analisis diskriminan terdapat uji ketepatan klasifikasi agar tidak terjadi

kesalahan yang cukup besar dalam proses pengelompokan. Oleh karena itu, penulis akan melakukan penyelesaian kasus klasifikasi kecamatan di Kabupaten Sleman berdasarkan fokus kesejahteraan dengan menggunakan analisis diskriminan.

Pada teknik analisis diskriminan terdapat dua macam yaitu analisis diskriminan dua kelompok dan analisis diskriminan ganda (membedakan lebih dari dua kelompok). Pada analisis diskriminan proses klasifikasi dilakukan dengan syarat kelompok telah terdefinisi terlebih dahulu. Berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS), kecamatan-kecamatan di Kabupaten Sleman belum dikelompokkan kedalam ketiga tingkatan kesejahteraan tersebut. Oleh karena itu sebelum memasuki analisis diskriminan ganda perlu dilakukan pengelompokan dengan analisis kluster dan selanjutnya dapat dilakukan analisis diskriminan ganda.

Pada pembentukan fungsi diskriminan terdapat dua metode estimasi yaitu *simultaneous estimation* dan *stepwise estimation*. *Simultaneous estimation* adalah metode estimasi untuk membentuk fungsi diskriminan yang dihitung berdasarkan seluruh variabel independennya tanpa memperhatikan kekuatan diskriminan dari masing-masing variabel independennya. *Stepwise estimation* merupakan alternatif untuk pendekatan *simultaneous*. Variabel independennya dimasukkan satu persatu ke dalam fungsi diskriminan berdasarkan kekuatannya.

Pengelompokan kecamatan di Kabupaten Sleman dengan analisis diskriminan ganda ini berdasarkan indikator kesejahteraan sosial yang meliputi bidang kependudukan, kesehatan, pendidikan, dan ketenagakerjaan. Kemudian

akan dicari variabel penciri yang memberikan kontribusi besar, sehingga dapat diketahui kecamatan mana saja yang tergolong dalam tingkat kesejahteraan sosial rendah, tingkat kesejahteraan sosial sedang dan tingkat kesejahteraan sosial tinggi

1.2 Batasan Masalah

Pada penulisan skripsi ini hanya akan dibahas analisis diskriminan ganda untuk tiga kelompok dengan metode *stepwise estimation*. Penyelesaian penerapan analisis diskriminan ganda pada data kesejahteraan di Kabupaten Sleman, digunakansoftware SPSS 17 dan Minitab 16.

1.3 Rumusan Masalah

1. Bagaimana langkah – langkah dalam analisis diskriminan ganda?
2. Bagaimana klasifikasi kecamatan di Kabupaten Sleman berdasarkan fokus kesejahteraan sosial yang meliputi bidang kependudukan, kesehatan, pendidikan, dan ketenagakerjaan dengan analisis diskriminan ganda?
3. Variabel apakah yang memberikan kontribusi yang besar untuk mencirikan kecamatan di Kabupaten Sleman berdasarkan analisis diskriminan ganda?

1.4 Tujuan

1. Mengetahui langkah-langkah analisis diskriminan ganda.
2. Mengklasifikasikan kecamatan di Kabupaten Sleman Berdasarkan fokus kesejahteraan sosial yang meliputi bidang kependudukan, kesehatan, pendidikan, dan ketenagakerjaandengan analisis diskriminan ganda.

3. Mengetahui variabel yang memberikan kontribusi yang besar untuk mencirikan kecamatan di Kabupaten Sleman berdasarkan analisis diskriminan ganda.

1.5 Manfaat

1. Menambah pengetahuan penulis mengenai studi klasifikasi kecamatan dalam program pengentasan kemiskinan.
2. Memberikan masukan kepada pemerintah daerah Kabupaten Sleman dalam menentukan kebijakan pembangunan daerah khususnya dalam bidang kesejahteraan sosial yang meliputi bidang kependudukan, kesehatan, pendidikan, dan ketenagakerjaan.